

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menyatakan bahwa dalam suatu organisasi harus terdapat pemisahan yang tegas antara aktivitas pengendalian dengan aktivitas operasional. Ketika pengendalian perusahaan tidak lagi dilakukan oleh pemilik, tetapi diserahkan kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya perusahaan, maka permasalahan yang muncul adalah potensi konflik dalam hubungan antara pemilik (*principals*) dengan pengelola (*agent*) (Triani, 2016).

Konflik tersebut disebabkan perbedaan tujuan masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan. Konflik ini muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *principal* (memaksimalkan kesejahteraan). Upaya untuk mengatasi permasalahan keagenan ini akan menimbulkan konsekuensi biaya yang disebut biaya agensi (*agency cost*) dan akan ditanggung oleh *principal* maupun agen.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara agent dan principal. Agent yaitu manajemen perusahaan sedangkan principal yaitu pemilik (pemegang saham). Teori keagenan memaparkan adanya pemisahan hak milik perusahaan dan pertanggungjawaban atas pembuatan keputusan. Hubungan keagenan selalu menimbulkan adanya permasalahan antara pemilik dan agen karena terjadinya perbedaan pola pikir serta perbedaan kepentingan yang menonjol. Mekanisme yang tepat untuk mengurangi masalah keagenan yaitu dengan adanya kepemilikan manajerial (Ratih, 2016)

##### **2.1.2 *Corporate Governance***

Sarafina dan Saifi (2017) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tata kelola perusahaan (*GCG*) merupakan salah satu bentuk dari *monitoring*. *GCG* adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir. Tujuannya untuk mempertahankan hak semua pemangku kepentingan. *GCG* dikembangkan untuk memastikan bahwa investor mendapatkan laba atas investasinya, setiap perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan dan mengevaluasi kinerjanya secara berkesinambungan agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik (Mahaendrayasa, 2017)

*Good Corporate Governance* merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

#### **2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)**

*Good Corporate Governance* (*GCG*) atau kelola perusahaan merupakan konsep pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pemisahan antara sistem kepemilikan dan pengendalian atas aktivitas yang dilakukan perusahaan. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengelolaan aktivitas perusahaan, sehingga diperkukan suatu keseimbangan antara pemilik dan pengelola modal. Dimana hubungan antara pemilik dan pengelola modal adalah pemilik menjamin bahwa investasi yang dilakukan oleh investor dapat memberikan jaminan keuntungan secara maksimal. Peranan atau fungsi dari *GCG* yaitu untuk mengurangi masalah keagenan antara pemilik dan pengelola (Macey dan O'Hara, 2003).

Forum for *GCG* in Indonesia (*FCGI*) dalam Hery (2010) mendefinisikan *GCG* sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *GCG* ialah untuk

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

GCG adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN yang dalam Effendi (2009), menyatakan: “GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

#### **2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance***

Forum GCG in Indonesia (2001) menjelaskan beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan GCG, antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders.

- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. GCG dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan- keputusan yang menguntungkan diri sendiri.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. GCG menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar- pasar yang sedang berkembang. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan *shareholders's value* dan dividen.

Syarat-syarat yang di tetapkan KNKG (2006) adalah perusahaan publik harus memiliki organ perusahaan diantaranya adalah RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan, sedangkan perusahaan yang belum memenuhi organ tersebut didefinisikan sebagai perusahaan yang belum menerapkan GCG. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham

Melaksanakan RUPS tahunan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah akhir tahun buku sesuai dengan pasal 65 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.

- b. Dewan Komisaris

Keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia telah diatur dengan berbagai peraturan. Menurut peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30%. Lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

c. Dewan Direksi

Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembalian putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independent dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. Tergantung dari sifat khusus suatu perseroan, seyogyanya paling sedikit 20% (dua puluh persertatus) dari jumlah anggota direksi harus berasal dari kalangan diluar perseroan.

d. Komite Audit

Bapepam dengan Surat Edaran No.SE-03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk Komite Audit dengan anggota minimal 3 orang, mayoritas harus independen yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

e. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

### **2.1.2.3 Komisaris Independen**

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris terdiri dari dua macam, yaitu komisaris yang terafiliasi dan komisaris independen. Komisaris yang terafiliasi merupakan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, serta dengan perusahaan itu sendiri, sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perseroan. Salah satu anggota dewan komisaris adalah para komisaris independen. Komisaris independen memiliki peran sebagai pengendali apabila terjadi konflik agensi

yang terjadi antara pihak manajemen dan para pemegang saham. Karena komisaris independen juga bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan, perilaku manajer, dan tindakan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan apabila terjadi penyimpangan yang telah disetujui antara pihak manajemen dan para pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak guna sebagai penyeimbangan pada tingkat risiko. Seperti yang dikatakan oleh Baek *et al.*, (2009) bahwa perusahaan dengan persentase komisaris independen yang semakin tinggi maka lebih mungkin untuk mengungkapkan secara luas proses manajemen informasi. Hasil penelitian Putra (2016) diperoleh hasil bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin ketat pengawasan dari dewan komisaris terhadap dewan direksi dan manajerial. Pengawasan tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan.

### **2.1.3 Kinerja Perusahaan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kinerja Perusahaan**

Menurut Menteri Keuangan RI berdasarkan Keputusan No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989, kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan tujuan atas sasaran perusahaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:4), informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja ini adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja keuangan bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Menurut Mulyadi (2001:416) Penilaian Kinerja adalah: Penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan

karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

- a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan adalah prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan dengan tolak ukur berdasarkan sasaran, standar atau kriteria tertentu pada periode tertentu.

### **2.1.3.2 Kinerja Keuangan Perusahaan**

Menurut Munawir (2010:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut Sawir (2003:144), dalam menilai kinerja keuangan yang menggunakan analisis rasio keuangan perlu diketahui standar rasio keuangan tersebut. Menurut Yuwono, Sukarno, dan Ichsan (2003:31), dengan adanya standar rasio keuangan, perusahaan dapat menentukan apakah kinerja keuangannya baik atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang diperoleh dengan standar rasio keuangan yang ada.

Pada umumnya, kinerja keuangan perusahaan dikategorikan baik jika besarnya rasio keuangan perusahaan bernilai sama dengan atau di atas standar

rasio keuangan. Menurut Munawir (2010:67), selain membandingkan rasio keuangan dengan standar rasio, kinerja keuangan juga dapat dinilai dengan membandingkan rasio keuangan tahun yang dinilai dengan rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan membandingkan rasio keuangan pada beberapa tahun penilaian dapat dilihat bagaimana kemajuan ataupun kemunduran kinerja keuangan sesuai dengan kegunaan masing-masing rasio tersebut. Menurut Munawir (2010:31), pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
- d. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang

Menurut Fabozzi dalam Siregar (2010), kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berada dalam kendali pihak manajemen perusahaan, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kendali manajemen perusahaan. Menurut Kasmir (2008) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Adapun profitabilitas yang terdiri dari ROE dan ROA yang dirumuskan sebagai berikut:

### 1) *Return On Equity* (ROE)

Menurut Sutrisno (2003), *return on equity* (ROE) atau sering disebut *rate of return on net worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. ROE dapat diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{EAT}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Halim (2003) mendefinisikan ROE sebagai rasio yang memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham biasa, setelah memperhitungkan bunga (biaya hutang) dan dividen saham preferen (biaya saham preferen). ROE menurut Higgins dalam (Munir: 2007) dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan dengan tiga cara: a) Pendapatan perusahaan dapat diperoleh dari setiap rupiah yang diperoleh dari penjualan, b) Penjualan dihasilkan dari setiap rupiah perputaran assets (*asset turnover*), c) Setiap hutang digunakan untuk membiayai asset dalam perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ROE adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Laba bersih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba bersih setelah pajak. ROE dapat menunjukkan keuntungan dari investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham. Adapun indikator ROE dalam penelitian ini adalah laba bersih setelah pajak dan modal sendiri.

### 2) *Return On Asset* (ROA)

Return On Assets (ROA) yang sering disebut juga sebagai return on investment (ROI) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio rentabilitas/profitabilitas yang lainnya. ROA atau ROI diperoleh dengan cara membandingkan antara *net income after tax* (NIAT) terhadap total

asset. Semakin besar ROA atau ROI menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar.

ROA di gunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio rentabilitas/profitabilitas yang lainnya. ROA diperoleh dengan membandingkan antara *Earning After Tax (EAT)* terhadap *total asset*. Semakin besar *ROA* menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar (Ang, 1997). Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Laba bersih setelah pajak (*Net Profit After Tax*) adalah laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana data yang digunakan adalah data yang tercantum didalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Total Assets adalah total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan yang tercantum di dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Menurut Helfert (2000) manfaat yang sebenarnya dari tiap rasio sangat ditentukan oleh tujuan spesifik analisis. Terdapat tiga kelompok yang paling berkepentingan dengan rasio-rasio finansial yaitu: para pemegang saham (dan calon pemegang saham), kreditur (dan calon kreditur) serta manajemen perusahaan (*the firm's own management*).

Kemudian Helfert (2000) mengatakan bahwa para pemegang saham (dan calon pemegang saham) menaruh perhatian utama pada tingkat keuntungan, baik yang sekarang maupun kemungkinan tingkat keuntungan pada masa yang akan datang. Hal ini sangat penting bagi para pemegang dan calon pemegang saham karena keuntungan ini akan mempengaruhi harga saham yang mereka miliki. Hubungan laba yang diperoleh dengan investasi yang ditetapkan pemegang saham diamati dengan cermat oleh komunitas keuangan. Analisis menelusuri beberapa ukuran pokok yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan kepentingan investor. Ada beberapa analisis/pengukuran tingkat

profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan memungkinkan seorang penganalisa untuk mengevaluasi tingkat laba (*earning*) dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Fokus pada profitabilitas, karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan (*profitable*). Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan dan terutama sekali pihak manajemen akan berusaha meningkatkan keuntungan, karena didasari betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan.

#### **2.1.4 Risiko Perusahaan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Risiko**

Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian (Hartono, 2005). Dengan kata lain, risiko merupakan suatu hal yang cenderung bersifat tidak pasti namun dapat memengaruhi masa depan. Risiko dapat terjadi karena kurangnya bahkan tidak tersedianya informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakterediaan informasi merupakan salah satu akibat dari timbulnya suatu masalah. Hal ini menyebabkan gangguan pada proses operasional suatu perusahaan. Bila gangguan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan suatu kerugian di masa yang akan datang.

Kerugian ini dapat dikatakan sebagai risiko yang timbul di perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui secara mendetail tentang risiko-risiko yang dapat muncul agar mengurangi terjadinya kerugian. Tidak dapat dihindari, setiap perusahaan pasti memiliki risiko masing-masing. Dari perusahaan yang kecil hingga perusahaan yang besar pun memiliki risiko, walaupun tingkat risiko yang dimiliki setiap perusahaan pasti berbedabeda. Oleh karena itu agar dapat mengurangi atau

bahkan menghilangkan risiko-risiko yang dapat muncul maka perlu dilakukannya manajemen risiko

#### **2.1.4.2 Manajemen Risiko**

Dalam menghadapi risiko yang berpotensi muncul di masa depan, maka perusahaan perlu melakukan pengelolaan risiko. Salah satu pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan perusahaan untuk mengelola risikonya atau menangkap kesempatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan (Amran et al., 2009).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut (Smith, 2000). Tindakan manajemen risiko diambil perusahaan untuk menghadapi bermacam-macam risiko. Dalam melakukan tindakan terhadap risiko, manajemen risiko berperan untuk merespon risiko dengan cara mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau melimpahkan risiko pada tahap awal proyek konstruksi. Menurut Darmawi (2005) manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

- a. Manajemen risiko memungkinkan untuk mencegah perusahaan dari kegagalan.
- b. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba
- c. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung
- d. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non-material bagi perusahaan itu.
- e. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan *public image*.

Terdapat beberapa proses manajemen risiko secara umum dengan melakukan langkah-langkah berikut ini (ICAEW, 2002):

- a. Pengidentifikasian risiko-risiko yang mungkin mengancam kegiatan operasi perusahaan, analisis dan penilaian profitabilitas serta dampak potensial risiko yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan.
  - b. Pemilihan teknik yang sesuai untuk menangani risiko berdasarkan pada probabilitas terjadinya risiko tersebut dan dampak yang dihasilkannya apakah dengan:
    - 1) Menghindari risiko (*risk avoidance*);
    - 2) mengurangi risiko (*risk reducing*);
    - 3) *risk retention* dengan membentuk cadangan;
    - 4) *risk deferral* atau;
    - 5) mentransfer risiko (*risk transfer*) pada pihak lain seperti perusahaan asuransi sesuai dengan strategi perusahaan.
  - c. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengelola risiko yang tersisa;
  - d. Mengawasi keefektifitasan manajemen risiko;
  - e. Belajar dari pengalaman dan membuat perbaikan terhadap manajemen risiko
- Proses manajemen risiko tiap perusahaan akan berbeda-beda. Hal ini tergantung dengan risiko yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Dalam konteks ini, yang terpenting adalah penerapannya sesuai dengan risiko yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Tugas mengelola risiko merupakan salah satu tugas manajer (*agent*). Tujuannya adalah agar para pemilik saham (*principal*) dapat meyakini bahwa perusahaan berjalan dengan baik.

#### **2.1.4.3 Pengungkapan Risiko (*Risk Disclosure*)**

Praktik pengungkapan risiko perusahaan merupakan bagian dari penerapan konsep pengungkapan (*disclosure*). Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan

informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil suatu aktivitas suatu unit usaha. Dalam interpretasi yang lebih luas, pengungkapan terkait dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan maupun informasi tambahan (*supplementary communications*) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis manajemen tentang operasi perusahaan di masa yang akan datang, prakiraan keuangan dan operasi, dan informasi lainnya (Nuswandari, 2009).

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang memiliki kandungan informasi berupa hal-hal yang wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan dengan tambahan informasi di dalamnya selain informasi yang wajib dicantumkan sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan tahunan dalam mengambil keputusan. Pengungkapan sukarela dapat mengubah harapan pemangku kepentingan tentang nilai perusahaan (Einhorn, 2007).

Terdapat beberapa peraturan tentang pengungkapan telah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah ketentuan tentang pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko diatur dalam BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang: kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Sedangkan Ketentuan mengenai pengungkapan informasi diatur dalam PSAK No.60 (Revisi 2010) tentang Instrumen keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. Standar ini menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru. PSAK No. 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko dan mensyaratkan entitas pelaporan untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa peraturan baru yang penting antara lain:

- a. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
- b. Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan
- c. Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan liabilitas keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan

Adapun prinsip-prinsip manajemen risiko, Menurut (Susilo dan Kaho, 2018) memiliki prinsip manajemen risiko sebagai berikut :

- a. Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah  
Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selain itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, *corporate governance*, efisiensi operasi dan lain-lain.
- b. Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi  
Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses organisasi, proyek, dan manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri dan terpisahkan dari kegiatan serta proses organisasi dalam mencapai sasaran.
- c. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan  
Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkap mungkin.
- d. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian  
Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen memperkirakan bagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimanakah hal tersebut harus ditangani.

- e. Manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu Sifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu digunakan dalam pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko. Dengan demikian, hasilnya dapat dibandingkan dengan memberikan hasil serta perbaikan.
- f. Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia Pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli dan data lain yang tersedia. Akan tetapi harus disadari bahwa semua informasi ini mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara para ahli.
- g. Manajemen risiko adalah khas untuk penggunaannya (*tailored*) Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal organisasi, serta sasaran organisasi dan profil risiko yang dihadapi organisasi tersebut.
- h. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya Penerapan manajemen risiko haruslah mengenali kapabilitas organisasi persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian organisasi.
- i. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif Untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini, para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiap tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria risiko.
- j. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi, konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga

mengalami perubahan. Manajemen risiko senantiasa memerhatikan, merasakan, dan tanggap terhadap perubahan.

- k. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut

Manajemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan pelaksanaan manajemen risiko, sejalan dengan aspek lain dari organisasi.

### **2.1.5 Hubungan Antara *Corporate Governance* Dengan Kinerja Perusahaan**

*Corporate Governance* dalam penelitian ini yaitu mengenai proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Fama dan Jensen, 2003). Barnhart dan Rosenstein dalam Lastanti (2004) melakukan penelitian mengenai “*Board Composition, Managerial Ownership and Firm Performance*”, yang membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari outsider director (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan (Lastanti, 2004).

### **2.1.6 Hubungan Antara *Corporate Governance* Dengan Risiko Perusahaan**

*Corporate Governance* dalam hal ini diproksikan dengan komisaris Independen merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan atau agency cost. Komisaris independen membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham.

Pemegang saham cenderung menuntut kepada komisaris independen untuk melakukan pengungkapan yang dilakukan secara luas. Mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi biaya agensi yang ditimbulkan merupakan salah satu tugas dari dewan komisaris independen. Peran yang dimiliki oleh komisaris independen ini akan memengaruhi pengungkapan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih banyak biasanya mengungkapkan informasinya secara lebih luas, dengan begitu hal ini juga dapat mengurangi biaya agensi. Pada penelitian Probohudono *et al.*, (2013) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase komisaris independen yang semakin tinggi maka lebih mungkin untuk mengungkapkan secara luas begitu pula manajemen informasinya. Pengaruh antara komisaris independen pada pengungkapan memperoleh hasil yang signifikan.

## **2.2 Tinjauan Peneliti Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai data pembandingan dan acuan terkait dengan kepuasan pelanggan.

Siagian (2013) dengan judul Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perdagangan dan Jasa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa mekanisme corporate governance perlu diberikan perbaikan dari sistem, proses dan struktur sehingga mencapai tujuan perusahaan.

Hendratni (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Direksi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian Setiawaty (2016) dengan judul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. Berdasarkan rumusan masalah, rumusan hipotesis dan hasil penelitian, maka penulis menarik simpulan bahwa manajemen risiko dapat berperan sebagai variabel intervening antara *Good Corporate Governance* dan Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung dari GCG terhadap Kinerja perbankan melalui manajemen risiko. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Wibowo (2015) Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Risiko Kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dan dilakukan dengan menggunakan regresi linier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ukuran corporate governance khususnya skor CGPI, ukuran dewan perusahaan, dan proporsi komite audit ahli berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan. Hasil penelitian lainnya adalah proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan.

Aditya (2015) dengan judul Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Risk Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan teknik SPSS. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *risk disclosure*. Sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Berikut hasil penelitian terdahulu yang digunakan dapat disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2. 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

Nama (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil	Perbedaan
Siagian (2013)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perdagangan dan Jasa)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa mekanisme <i>corporate governance</i> perlu diberikan perbaikan dari sistem, proses dan struktur sehingga mencapai tujuan perusahaan	Perbedaannya yaitu pada obyek penelitian dan periode data penelitian. Penelitian Siagian (2013) tidak menggunakan analisis risiko perusahaan dan tidak melakukan analisis intervening.
Hendratni (2018)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2016	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Direksi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan	Obyek penelitian dan periode data yang digunakan untuk penelitian. Penelitian Hendratni (2018) tidak menggunakan analisis risiko perusahaan dan tidak melakukan analisis intervening.
Setiawaty (2016)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perbankan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel	Analisis Jalur	Manajemen risiko dapat berperan sebagai variabel intervening antara <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung dari GCG terhadap Kinerja perbankan melalui manajemen risiko.	Perbedaannya yaitu yaitu obyek dan periode tahun data penelitian yang digunakan.

	Intervening			
Wibowo (2015)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Risiko Kebangkrutan	Regresi Linear Berganda	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ukuran <i>corporate governance</i> khususnya skor CGPI, ukuran dewan perusahaan, dan proporsi komite audit ahli berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan. Hasil penelitian lainnya adalah proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan	Penelitian Wibowo (2015) tidak menggunakan analisis kinerja perusahaan dengan perbedaan teknik analisis data yang digunakan.
Aditya (2015)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Risk Disclosure</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)	Regresi Linear Berganda	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>risk disclosure</i> . Sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko	Penelitian Aditya (2015) tidak menggunakan analisis kinerja perusahaan dengan perbedaan teknik analisis data yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang digunakan maka terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, perbedaannya yaitu terletak pada obyek penelitian dan indikator dari *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan perusahaan. Adapun persamaan dari beberapa penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan dan risiko perusahaan.

### 2.3 Model Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan maka dapat disusun model konseptual penelitian yang merupakan alur penelitian yang akan dilakukan. Adapun model konseptual penelitian dapat disajikan pada gambar 2.3.



**Gambar 2.1**

**Model Konseptual**

Berdasarkan model konseptual dapat diketahui bahwa mekanisme GCG juga dapat membantu perusahaan dalam peningkatan kinerja. Penelitian oleh *Weir et al* (2002) memperoleh hasil bahwa mekanisme internal dan eksternal tata kelola berpengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan memberikan dampak terhadap risiko perusahaan dan adanya pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan risiko perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

**2.4 Pengembangan Hipotesis**

- 2.4.1 HIPOTESIS 1. Ada pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 2.4.2 HIPOTESIS 2. Ada pengaruh *corporate governance* terhadap risiko perusahaan pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 2.4.3 HIPOTESIS 3. Ada pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan risiko perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia